

Keamanan Komunitas dan Tata Kelola Perbatasan: Studi Kasus Wilayah Baarle-Nassau dan Baarle-Hertog

Firsty Chintya Laksmi Perbawani¹

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Indonesia

e-mail: firsty.chintya.hi@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

*This article examines community security and border governance through a case study of Baarle-Nassau (Netherlands) and Baarle-Hertog (Belgium), an enclave-exclave region marked by extreme spatial and administrative fragmentation, comprising 30 enclaves in total; 22 Belgian enclaves within the Netherlands and 8 Dutch counter-enclaves within Belgian territory. Using a qualitative-descriptive method and the UNDP's (2012) framework of community security, this article explores seven key dimensions: (1) historical-rooted spatial fragmentation reflects unresolved conflict legacies; (2) civic participation is institutionalized through joint bodies like Gemeenschappelijke Orgaan Baarle (GOB) and Benelux Grouping for Territorial Cooperation (BGTC); (3) multi-sectoral collaboration enables dual delivery of services such as education and emergency response; (4) strong social cohesion is fostered through inclusive events and symbolic integration; (5) access to reliable public services is ensured via shared schools and infrastructure; (6) the absence of intercommunal violence demonstrates effective boundary normalization; and (7) local institutions exhibit strong capacity for cross-border coordination. These findings are situated within the broader framework of border governance, showing how overlapping jurisdictions and divided territories give rise to **mosaic sovereignty**, where functional cooperation overrides territorial rigidity, and **everyday bordering**, where symbolic negotiation and civic routines normalize fragmentation. The Baarle case thus illustrates how human security and border governance can coexist through flexible, inclusive, and community-centered practices.*

Keywords: community security, border governance, mosaic sovereignty, Baarle-Nassau, Baarle-Hertog

*Tulisan ini menganalisis keamanan komunitas dan tata kelola perbatasan melalui studi kasus Baarle-Nassau (Belanda) dan Baarle-Hertog (Belgia), wilayah enclave-exclave yang mengalami fragmentasi spasial yang kompleks, dengan total 30 enclave: 22 enklave Belgia di dalam Belanda dan 8 counter-enclave Belanda di dalam wilayah Belgia. Menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan konsep “community security” dari UNDP (2012), tulisan ini mengkaji tujuh indikator: (1) fragmentasi spasial historis mencerminkan warisan konflik pembagian wilayah yang belum terselesaikan; (2) partisipasi warga terwujud melalui lembaga bersama seperti GOB dan BGTC; (3) kolaborasi lintas sektor memungkinkan dual-delivery services dalam pendidikan dan layanan darurat; (4) kohesi sosial dibangun melalui kegiatan inklusif dan simbol bersama; (5) layanan publik yang layak dan konsisten difasilitasi melalui infrastruktur bersama; (6) tidak adanya kekerasan antar komunitas menunjukkan efektivitas boundary normalization; dan (7) kapasitas lembaga lokal dalam koordinasi lintas batas terbukti kuat. Temuan-temuan tersebut dalam kerangka besar tata kelola perbatasan, menunjukkan bahwa yurisdiksi yang tumpang tindih dan wilayah yang terbagi dapat melahirkan **mosaic sovereignty**, yakni bentuk kedaulatan yang terbagi-bagi namun fungsional, di mana kerja sama lintas wilayah lebih diutamakan daripada kekakuan batas teritorial. Selain itu, praktik **everyday bordering**, yakni negosiasi simbolik dan rutinitas kewargaan sehari-hari mampu menormalkan kondisi fragmentasi wilayah. Kasus Baarle*

membuktikan: keamanan manusia (khususnya keamanan komunitas) dan tata kelola perbatasan dapat dikelola dengan baik melalui pendekatan yang fleksibel, inklusif, dan berorientasi pada komunitas.

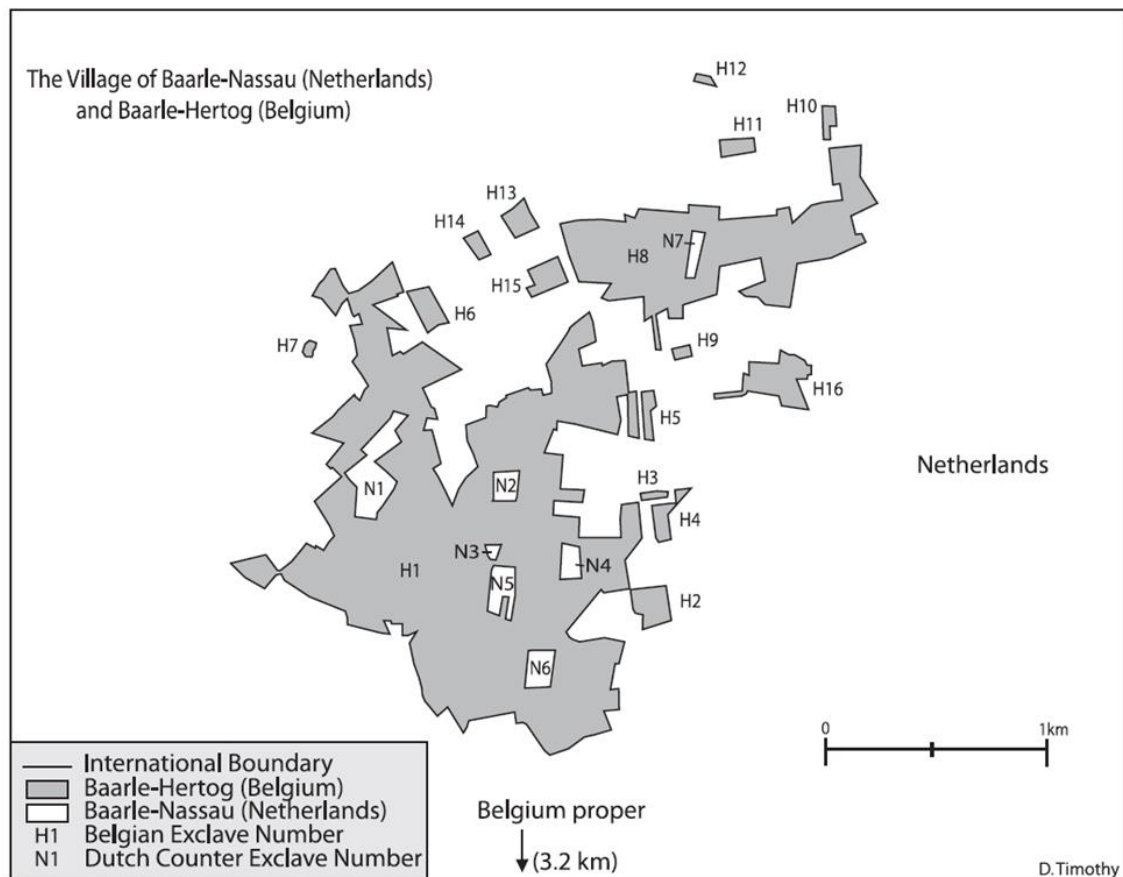
Kata kunci: keamanan komunitas, tata kelola perbatasan, kedaulatan mosaik, Baarle-Nassau, Baarle-Hertog

Pendahuluan

Keamanan manusia, khususnya keamanan komunitas menjadi salah satu ruang lingkup studi yang menarik untuk dibahas di era globalisasi. Terlebih lagi jika terletak di sebuah wilayah yang pembagian *border* negaranya sangat kompleks; tata kelola perbatasannya menjadi urgen untuk dianalisis. Seperti halnya wilayah Baarle, yang terletak di perbatasan antara negara Belanda dan Belgia, menghadirkan salah satu contoh paling rumit dari fragmentasi spasial dan tata kelola lintas negara di Eropa era kontemporer ini. Terdiri dari dua kotamadya (*municipality*), yakni Baarle-Nassau (Belanda) dan Baarle-Hertog (Belgia), wilayah ini mencakup total 30 enklave terdiri dari 22 enklave milik Belgia yang berada di dalam wilayah Belanda, dan 8 counter-enklave milik Belanda yang berada di dalam enklave Belgia (Billé, 2020; de Villiers, 2012). Situasi ini menjadikan Baarle sebagai wilayah dengan konfigurasi enklave-eksklave paling kompleks di dunia, bahkan melebihi kasus serupa di Asia Selatan seperti Dahala Khagrabari antara India dan Bangladesh yang kini sudah dinormalisasi. Berikut adalah gambar bagaimana terfragmentasinya wilayah Baarle:



Gambar 1. Peta Baarle
Sumber: (Marchon, 2022)



* Not all of the outlying rural exclaves are illustrated on this map.

Gambar 2. Fragmentasi Border antara Belanda dan Belgia di Wilayah Baarle

Sumber: (Billé, 2020)

Gambar peta dan fragmentasi border di atas menjelaskan bahwa ada 22 enklave Belgia (H1 – H22) dan 8 counter-enklave Belanda (N1 – N8). Baarle-Hertog (Belgia atau H1) terdiri dari 4 bagian di Belgia dan 22 enklave di Belanda. Sedangkan Baarle-Nassau (Belanda atau N1) terdiri dari 1 bagian di Belanda, 7 enklave di enklave Baarle-Hertog dan 1 enklave di Belgia (Marchon, 2022). Arsitektur spasial semacam ini disebut oleh Franck Billé (2020) sebagai *jigsaw micropartitioning*, suatu partisi mikro dengan pola yang menyerupai potongan puzzle, menciptakan situasi “**nested sovereignty**” yang sangat sulit untuk ditata ulang secara geopolitik. Apabila ditafsirkan yakni sangat kompleks, seperti sarang yang bisa ditemui dimana-mana; tanpa ada batasan yang jelas.

Keunikan spasial ini bukan hanya berdampak pada representasi kartografis, tetapi juga pada keberfungsian administratif, legal, dan sosial di kehidupan sehari-hari atau pada tataran empirisnya. Dalam banyak kasus, satu bangunan dapat mengikuti dua yurisdiksi hukum berbeda, tergantung pada letak pintu depannya. Aturan yang dikenal sebagai *front door rule* atau *voordeurregel* ini menjadikan orientasi arsitektur sebagai parameter kewarganegaraan administratif di Baarle (Billé, 2020). Garis batas negara di kota Baarle memiliki keunikan tersendiri, bahkan termasuk ke dalam salah satu border internasional yang bisa dilewati dengan satu langkah kaki. Bisa saja satu rumah di mana ruang dapurnya adalah bagian dari Nassau (Belanda) tetapi ruang tamunya adalah bagian dari Hertog (Belgia) (Borgen, 2019).



Gambar 3. Loveren sebagai Representasi *Front Door Rule* dan Penomoran Bangunan di Wilayah Baarle
Sumber: (Bilivoka, 2017)

Gambar di atas adalah contoh kompleksitas di daerah Loveren yang secara peta berada di Baarle-Nassau; namun ada beberapa bangunan yang tepat terletak di dua negara sehingga memiliki alamat ganda direpresentasikan oleh warna bendera pada nomor bagunannya. Seperti pada gambar yakni nomor 33 A untuk alamat di Belanda dan 3 untuk alamat di Belgia (Bilivoka, 2017). Dapat dipertegas bahwa penanda batas di Baarle ada bukan dalam bentuk fisik seperti pagar atau tembok, tetapi simbol-simbol mikro seperti lambang negara pada papan alamat rumah, cat trotoar (seperti gambar 3), atau bahkan paku logam kecil yang tertanam di jalanan kota; disebut “*soft border*” (Harkness, 2015). Dalam kehidupan sehari-hari, batas negara di Baarle nyaris tidak bisa dirasakan, karena orang bisa melintasi dua negara hanya dengan satu langkah tanpa menyadarinya, berbeda dengan “*hard border*” di wilayah lain seperti Hongaria dan Serbia yang harus melewati pagar perbatasan (Perbawani, 2022, hal. 816-817). Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana keamanan komunitas dijaga dan bagaimana tata kelola perbatasan diatur dalam situasi yang kompleks ini.

Akar dari situasi kompleks ini bersumber dari perjanjian feodal pada akhir abad ke-12 antara Henry I, Adipati Brabant, dan Godfrey of Schoten dari Breda, yang membagi wilayah Baarle menjadi unit-unit kepemilikan tanah berdasarkan loyalitas politik dan feodalisme. Ketika negara-bangsa modern terbentuk, terutama pasca kemerdekaan Belgia tahun 1830, struktur feodal tersebut tidak serta-merta dihapuskan. Sebaliknya, perjanjian bilateral antara Belgia dan Belanda seperti Treaty of London (1839), Additional Convention (1842), dan Boundary Convention (1843) justru mempertahankan *status quo* melalui prinsip dokumentasi administratif tanpa delimitasi spasial secara linier (Franckx, 1998, hal. 340-341). Upaya paling ambisius terjadi pada tahun 1995, ketika kedua negara memetakan 960 titik koordinat dalam sebuah *procès-verbal*, yang lebih merupakan dokumentasi legal ketimbang penyederhanaan spasial (Billé, 2020). Pemetaan tersebut menjelaskan bagaimana legalitas spasial dapat tetap dijaga meski batas-batas bordernya bukan secara fisik.

Dari sisi statistik, populasi Baarle-Nassau tercatat sebanyak 7.205 jiwa pada tahun 2023, dengan pertumbuhan sekitar 1,1% per tahun menurut CBS Netherlands (2021). Sementara itu, Baarle-Hertog memiliki populasi sekitar 3.001 jiwa pada tahun 2024 berdasarkan data dari Statbel Belgium (2024). Meski kecil secara demografis, aktivitas lintas batas di kedua wilayah Baarle ini sangat dinamis dan menyentuh berbagai aspek kehidupan warga sebagai komunitas; mulai dari kegiatan ekonomi, pendidikan, hingga budaya. Festival tahunan “Op de Grens” misalnya, menjadi wadah interaksi sosial sekaligus simbol dari kohesi komunitas yang melampaui batas politik dan administratif di kehidupan sehari-hari masyarakat di wilayah Baarle (DXP, 2024).

Dalam konteks ini, konsep *community security* seperti yang dirumuskan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP, 2012) menjadi sangat relevan. Keamanan komunitas tidak lagi hanya dipahami sebagai absennya konflik atau kekerasan, tetapi juga sebagai keberfungsian sosial yang ditopang oleh partisipasi warga, kohesi sosial, akses pada layanan dasar, serta kapasitas kelembagaan lokal. Dimensi-dimensi tersebut tidak hadir secara otomatis, tetapi merupakan hasil dari tata kelola yang inklusif dan fleksibel, seperti yang ditunjukkan oleh kasus Baarle. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan tradisional terhadap batas negara yang menekankan kejelasan garis fisik dan eksklusivitas kedaulatan tidak selalu aplikatif. Justru, kasus Baarle mengindikasikan bahwa struktur fragmentasi teritorial dapat dikelola secara efektif selama terdapat mekanisme kerja sama administratif dan pengakuan simbolik yang kuat terhadap kompleksitas yang ada. Dalam pengertian ini, *mosaic sovereignty* dan *everyday bordering* bukan sekadar konsep akademik, melainkan realitas yang dijalankan secara fungsional dan berkelanjutan di Baarle, nanti lebih lanjut dijelaskan.

Berdasarkan latar belakang historis dan konfigurasi spasial yang sangat kompleks tersebut, tulisan ini membahas: Bagaimana indikator-indikator *community security* versi UNDP (2012) termasuk analisis akar konflik, partisipasi sipil, kolaborasi lintas sektor, kohesi sosial, akses pada layanan publik dasar, pengurangan kekerasan, dan kapasitas kelembagaan lokal; terwujud atau terimplementasi dalam praktik keseharian di wilayah terfragmentasi seperti Baarle? Lebih jauh, sejauh mana konsep *mosaic sovereignty* dan *everyday bordering* dapat menjelaskan keberhasilan tata kelola perbatasan yang stabil dan inklusif dalam struktur enklave-eksklave yang kompleks?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk memahami dinamika keamanan komunitas dan tata kelola perbatasan di wilayah enklave-eksklave Baarle, yang terdiri atas dua kotamadya: Baarle-Nassau (Belanda) dan Baarle-Hertog (Belgia). Fokus utama diarahkan pada bagaimana struktur spasial yang terfragmentasi memengaruhi bentuk-bentuk kedaulatan, interaksi warga, serta pola kolaborasi lintas yurisdiksi antar dua negara.

Guna menjawab pertanyaan pertama mengenai implikasi keamanan komunitas di Baarle maka dianalisis menggunakan kerangka konsep **“keamanan komunitas”** dari *United Nations Development Programme* (UNDP, 2012). Keamanan komunitas adalah satu dari tujuh bentuk keamanan manusia berdasar pada *Human Development Report* HDR tahun 1994. UNDP HDR tersebut mendefinisikan keamanan komunitas sebagai upaya perlindungan terhadap disintegrasi komunitas, seperti kelompok sosial, suku, atau etnis tertentu, yang memberikan rasa identitas serta sistem nilai bersama bagi para anggotanya (UNDP, 2012, hal. 13). Untuk melihat implementasinya mencakup tujuh indikator utama: (1) analisis akar konflik, (2) partisipasi dan akuntabilitas, (3) intervensi lintas sektor, (4) kohesi sosial, (5) layanan publik dasar, (6) pengurangan kekerasan/kriminalitas, dan (7) kapasitas kelembagaan lokal. Kerangka ini digunakan sebagai instrumen analitik untuk memetakan dinamika sosial-politik di wilayah yang secara spasial dan administratif terpecah seperti Baarle.

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan mengenai tata kelola perbatasan yang kompleks, menggunakan dua konsep kunci dalam studi perbatasan sebagai lensa konseptual tambahan. Pertama, *mosaic sovereignty*, yakni kedaulatan dalam bentuk partisi fungsional yang tetap berjalan meskipun tidak berbentuk satu kesatuan spasial. Lebih lanjut, kedaulatan bukan lagi dimaknai sebagai kekuasaan tunggal atas satu

wilayah yang utuh, tetapi sebagai bentuk distribusi yurisdiksi dalam ruang yang bersifat interstisial, yaitu ruang-ruang kecil yang saling bersinggungan dan bahkan bertumpang tindih (Zhurzhenko, 2012, hal. 365). Konsep ini sangat cocok untuk menggambarkan kompleksitas fragmentasi wilayah yang terjadi di Baarle. Kedua, konsep **everyday bordering** yang menjelaskan bagaimana praktik-praktik kewargaan, simbolisme spasial, dan tindakan harian warga membentuk pemaknaan terhadap batas negara secara informal namun signifikan atau sering disebut sebagai *sovereignty-in-practice* atau kedaulatan dalam level praktis sehari-hari (Billé, 2020). Kedua konsep ini digunakan untuk memperkaya pemahaman mengenai bagaimana batas negara tidak hanya ditentukan oleh kebijakan makro, tetapi juga oleh interaksi sosial dan rutinitas administratif mikro di kedua kotamadya Baarle.

Sumber data utama penelitian berasal dari studi literatur, dokumen administratif bilateral (seperti *procès-verbal* 1995), peraturan lokal dari GOB dan BGTC, artikel ilmiah, laporan institusi internasional, serta laporan media kredibel dari Belgia dan Belanda. Data-data tersebut dipilih berdasarkan relevansi dengan indikator UNDP dan kerangka konseptual tata kelola perbatasan. Sebagai metode pengumpulan data, penulis melakukan telaah pustaka pada sumber yang akademis (*scholarly-resources*) serta laporan UNDP yang secara eksplisit mendefinisikan *community security* sebagai pendekatan holistik berbasis komunitas untuk menciptakan keamanan manusia yang inklusif dan partisipatif (UNDP, 2012, hlm. 6–9). Dalam beberapa bagian, data visual pendukung seperti peta enklave-eksklave; serta dokumentasi di lapangan (secara empiris) digunakan sebagai data pelengkap untuk menggambarkan secara konkret bentuk-bentuk *nested sovereignty*.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan memetakan temuan terhadap tujuh indikator UNDP dan dua konsep tata kelola perbatasan. Teknik ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara dimensi keamanan komunitas dengan kompleksitas struktur wilayah dan praktik kewargaan lintas batas. *Scope* penelitian difokuskan pada keseluruhan wilayah administratif Baarle-Hertog dan Baarle-Nassau serta institusi lintas batas seperti GOB dan BGTC. Dengan desain metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana keamanan komunitas dapat terbangun secara efektif dalam struktur wilayah yang sangat terfragmentasi, serta bagaimana tata kelola perbatasan kontemporer diimplementasikan melalui bentuk-bentuk kedaulatan yang fleksibel dan partisipatif di Baarle.

Hasil dan Pembahasan

Bahasan akan dibagi ke dalam dua sub-pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan penulis. Pertama, berfokus menganalisis keamanan komunitas di Baarle dengan tujuh indikator pendekatan UNDP. Kedua, berfokus pada bahasan tata kelola perbatasan dengan konsepsi *mosaic sovereignty* dan *everyday bordering*.

Analisis Implikasi Tujuh Indikator Keamanan Komunitas di Wilayah Baarle

Kerumitan dan kompleksitas fragmentasi wilayah Baarle justru unik untuk diteliti, utamanya melihat bagaimana keamanan komunitas di Baarle bisa dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakatnya. Bagian ini menjawab implikasi keamanan komunitas sesuai dengan tujuh indikator UNDP (2012): (1) analisis akar konflik, (2) partisipasi dan akuntabilitas, (3) intervensi lintas sektor, (4) kohesi sosial, (5) layanan publik dasar, (6) pengurangan kekerasan/kriminalitas, dan (7) kapasitas kelembagaan

lokal. Penulis menjabarkan hasil analisis pada tabel berikut, di mana selanjutnya akan diberikan analisis penjabar sesudahnya.

Tabel 1. Analisis Keamanan Komunitas Baarle Berdasar Indikator UNDP

Indikator UNDP	Deskripsi Penjabar Indikator	Implementasi dalam Studi Kasus Baarle
1. Analisis Akar Konflik	Identifikasi faktor penyebab ketidakamanan komunitas (politik, sejarah, ekonomi).	Kompleksitas sejarah feodal dan perjanjian tanah antara Brabant dan Breda menjadi akar enklave-eksklave; warisan struktur spasial yang tidak linier dan terlalu banyak terpecah.
2. Partisipasi dan Akuntabilitas	Keterlibatan aktor dalam perencanaan keamanan dan transparansi kebijakan lokal.	Adanya badan bersama seperti <i>Gemeenschappelijke Orgaan Baarle</i> (GOB) dan <i>Benelux Grouping for Territorial Cooperation</i> (BGTC) untuk pengambilan keputusan lintas negara secara partisipatif.
3. Intervensi Lintas Sektor	Pendekatan kolaboratif dalam penyediaan keamanan, layanan dasar, dan pembangunan.	Koordinasi lintas yurisdiksi dalam penyediaan layanan publik seperti sekolah, utilitas, dan pemadam kebakaran (prinsip <i>functional territoriality</i>).
4. Kohesi Sosial (<i>Social Cohesion</i>)	Membangun kepercayaan dan interaksi antar komunitas lintas identitas.	Adanya tim sepak bola bersama; Gloria US (Belanda) dan KVV DOSKO (Belgia), hingga penggunaan bahasa yang hampir sama.
5. Layanan Publik Dasar (<i>Community Services</i>)	Aksesibilitas, reliabilitas, dan kualitas layanan publik.	Operator lintas-komunal yang mengatur utilitas pengelolaan air permukaan dan limbah rumah tangga seperti <i>Waterschap Brabantse Delta</i> , pengumpulan sampah oleh <i>Intercommunale IOK Afvalbeheer</i>
6. Pengurangan Kekerasan atau Kriminalitas	Menurunnya konflik kekerasan, tindak kriminal, atau potensi gesekan sosial.	Tidak ada konflik horizontal signifikan meski ada perbedaan hukum <i>lockdown</i> saat COVID-19; masyarakat cenderung menciptakan <i>micro-boundary practices</i> secara damai.
7. Kapasitas dan Kolaborasi Lembaga Lokal	Kemampuan lembaga lokal dalam merespons dan mengelola keamanan komunitas.	GOB dan BGTC berfungsi sebagai forum kerja sama administratif; kolaborasi dinas pemadam

		kebakaran, kesehatan, dan perizinan lintas negara.
--	--	--

Sumber: (UNDP, 2012) dan Analisis Penulis

Pertama, **analisis akar konflik**, yang menekankan pentingnya memahami penyebab struktural dan historis dari ketidakamanan komunitas. Dalam konteks wilayah Baarle, akar konflik tidak berbentuk kekerasan bersenjata atau ketegangan antar komunitas, melainkan terletak pada warisan spasial yang sangat terfragmentasi akibat sejarah feodal yang rumit. Fragmentasi ini berasal dari perjanjian tanah antara Henry I dari Brabant dan Godfrey of Schoten dari Breda pada abad ke-12, yang membagi kepemilikan tanah secara tidak linier berdasarkan loyalitas feodal, bukan batas-batas administratif modern. Dalam kesepakatan tersebut, Henry I yang memimpin Kadipaten (*Duchy*) Brabant, sebuah entitas wilayah politik yang penting dalam Kekaisaran Romawi Suci di mana menyerahkan hak atas beberapa bidang tanah kepada Godfrey. Namun, ia tetap mempertahankan yurisdiksi langsung atas sejumlah vassal, atau pengikut setia feodalnya, di wilayah yang sama. Situasi ini kemudian berkembang menjadi sistem kepemilikan lahan yang tidak jelas, menciptakan apa yang kelak menjadi salah satu struktur enklave paling kompleks di dunia yakni Baarle (Billé, 2020).

Alih-alih menetapkan garis batas atau *border* yang tegas seperti pada sistem *nation-state* di era kontemporer, perjanjian tersebut menciptakan pembagian yurisdiksi wilayah yang saling tindih (*overlapping*). Warisan histori ini kemudian dipertahankan dalam berbagai perjanjian bilateral antara Belgia dan Belanda di tahun-tahun berikutnya, seperti *Treaty of London* tahun 1839 dan *Additional Convention* tahun 1842. Namun semua upaya perjanjian tersebut tidak mencoba menyederhanakan batas-batas, melainkan memilih mempertahankan *status quo* demi stabilitas administratif antar dua negara (Jańczak, 2012). Upaya menarik pada kesepakatan perjanjian lebih lanjut seperti *procès-verbal* 1995 yang memetakan 960 titik koordinat hanya memperkuat legalitas struktur yang ada tanpa mengurangi kompleksitasnya (Billé, 2020). Sehingga, dapat dilihat bahwa pada analisis akar konflik, kondisi yang terfragmentasi tersebut menempatkan Baarle sebagai studi kasus yang unik dalam memahami bagaimana “konflik” dapat berupa warisan struktur sosial-politik yang tidak terintegrasi, bukan semata-mata tindakan kekerasan atau instabilitas sosial.

Kedua, **partisipasi dan akuntabilitas**, yang menekankan pentingnya pelibatan berbagai aktor lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan keamanan dan pelayanan publik (UNDP, 2012). Hal ini tidak hanya menciptakan ruang deliberatif bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat akuntabilitas institusional pemerintah kotamadya, baik Baarle-Nassau maupun Baarle-Hertog. Baarle menjadi contoh bagaimana partisipasi lintas negara dapat dilembagakan secara struktural. Sejak tahun 1990-an, dibentuk lembaga *Gemeenschappelijke Orgaan Baarle* (GOB), yaitu sebuah badan gabungan yang terdiri atas perwakilan pemerintah Baarle-Nassau (Belanda) dan Baarle-Hertog (Belgia). GOB menjalankan fungsi koordinatif dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama lintas yurisdiksi, seperti pemadam kebakaran, pengelolaan sampah, perencanaan ruang, hingga infrastruktur publik seperti sekolah dasar yang digunakan bersama (European Commission, 2022). Mekanisme GOB tidak bersifat hirarkis, melainkan deliberatif dan konsensus, mencerminkan prinsip-prinsip *joint-governance* (tata kelola bersama) yang berbasis pada kesetaraan yurisdiksi.

Selain GOB, pada tahun 2021, didirikan *Benelux Grouping for Territorial Cooperation* (BGTC) sebagai wadah kerja sama teritorial yang melibatkan tidak hanya dua kota madya, tetapi juga pemerintah pusat Belanda dan Belgia dalam menyusun kerangka

pembangunan lintas batas yang inklusif dan akuntabilitas terkoordinasi. BGTC menjadi contoh nyata dari *multi-level governance*, di mana institusi lokal mendapat legitimasi dalam mengelola wilayah spasial yang secara hukum terbagi, namun secara fungsional menyatu. Kerjasama BGTC ini beroperasi di ranah administratif dan mencakup berbagai sektor layanan publik, termasuk perencanaan wilayah dan tata kota (European Commission, 2022, hal. 47). Tidak ada badan supranasional, tetapi konsensus dibangun melalui forum lintas-batas berbasis dialog dan kepercayaan dan lebih kepada ala kotamadya Eropa. Adanya GOB dan BGTC membuktikan bahwa partisipasi dan akuntabilitas dapat dioperasionalisasi dalam konteks teritorial yang rumit, bahkan ketika batas wilayah tidak linier dan yurisdiksi saling tumpang tindih seperti di Baarle. Hal ini memperkuat argumen bahwa tata kelola berbasis komunitas dan kolaborasi dapat menjadi strategi efektif dalam menciptakan keamanan komunitas yang berkelanjutan.

Ketiga, **intervensi lintas sektor**, yang menekankan pada sinergi antarlembaga, baik formal maupun informal, dalam memberikan keamanan dan layanan dasar secara terpadu. Indikator ini menekankan pentingnya keterhubungan antara aspek sosial, ekonomi, politik, dan institusional dalam membangun rasa aman komunitas (UNDP, 2012). Di wilayah seperti Baarle, yang secara spasial terfragmentasi dan terletak dalam yurisdiksi ganda, intervensi lintas sektor menjadi syarat mutlak untuk keberlanjutan tata kelola komunitas. Baarle menunjukkan bagaimana *functional territoriality* bekerja sebagai alternatif dari *territorial exclusivity* (Jańczak, 2012). Artinya, alih-alih menegaskan batas kedaulatan secara tegas, dua entitas negara (Belanda dan Belgia) justru menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara bersama melalui mekanisme kolaboratif.



Gambar 4. Sekolah De Uilenpoort di Baarle-Nassau

Sumber: (de Uilenpoort, 2025)

Mekanisme kolaboratif lintas-sektor tampak nyata dalam pengelolaan sekolah-sekolah Belanda di Baarle Nassau seperti *OBS De Uilenpoort* menerima siswa dari wilayah Baarle-Hertog, dan sebaliknya, sekolah-sekolah Belgia menerima warga dari Baarle-Nassau. Kurikulumnya tetap mengikuti sistem nasional masing-masing, tetapi dalam praktiknya implementasi saling menghargai terjadi, contohnya ketika guru-guru Belanda, misalnya, mengatur ujian berdasarkan hari libur Belgia demi menyesuaikan ritme siswa lintas negara. Layanan darurat seperti pemadam kebakaran dan penyelamatan juga dikelola secara kolaboratif, di mana satu unit layanan bersama dapat menjangkau seluruh wilayah Baarle, tanpa mempermasalahkan batas negara secara administratif. Dalam praktiknya, integrasi operasional ini dijalankan oleh *Gemeenschappelijke Orgaan Baarle* (GOB), yang tidak hanya mengelola fasilitas publik, tetapi juga mengoordinasikan infrastruktur seperti jalan, penerangan umum, sistem

pembuangan limbah, dan pembangunan lainnya, meskipun berbeda yurisdiksi nasional (European Commission, 2022).

Pendekatan lintas sektor di Baarle mencerminkan bentuk keberhasilan bersama dalam menghadapi kondisi struktural yang tidak biasa. Kolaborasi lintas yurisdiksi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga simbolis; menunjukkan bahwa keterpisahan spasial tidak harus menjadi hambatan dalam menciptakan pelayanan publik yang terintegrasi dan inklusif. Dengan kata lain, keamanan komunitas di Baarle tidak berdiri sendiri dalam sektor keamanan semata, melainkan hasil dari interkoneksi antar sektor yang dikelola dengan prinsip saling menghormati yurisdiksi dan kebutuhan warganya.

Keempat, **kohesi sosial**, yang menekankan pentingnya solidaritas dan kepercayaan sosial sebagai fondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Di tengah kompleksitas spasial Baarle yang terdiri dari 30 enklave dan eksklave, kohesi ini diuji melalui interaksi keseharian yang melampaui batas administratif. Ini dapat dilihat dari beberapa hal. Contoh yang bisa mengintegrasikan kohesi sosial terlihat dari olahraga lintas negara serta penggunaan bahasa sedikit berbeda namun saling dimengerti. Baarle memiliki dua klub sepak bola: Gloria US (Belanda) dan KVV DOSKO (Belgia), yang beroperasi di wilayah Baarle-Nassau dan Baarle-Hertog serta sering mengadakan pertandingan persahabatan dan turnamen bersama (Tukker, 2024). Kedua klub tersebut mayoritas anggotanya berasal dari lintas yurisdiksi atau lintas negara, sekalipun berbeda kewarganegaraan, pada kesehariannya sering mengadakan latihan rutin bersama. Interaksi tersebut memperkuat kohesi sosial di Baarle.



Gambar 5. Stadion Bola Klub KVV DOSKO
Sumber: (Tukker, 2024)

Faktanya, stadion klub sendiri berada tepat di sepanjang garis perbatasan, menggambarkan bagaimana warga kedua negara dapat berkumpul di "lapangan bersama" tanpa terganggu oleh yurisdiksi batas negara. Fakta empiris ini memperkuat identitas kolektif yang melewati domain batas nasional, namun terikat dalam komunitas lokal yang saling terhubung. Di sela pertandingan, warga berbincang, saling bertukar identitas nasional, dan saling memahami kebiasaan budaya yang mana rutinitas harian warga menegosiasi perbedaan batas administratif, batas negara sudah melebur. Peleburan dan kohesi antar warga terjadi, sekaligus memberikan ruang bagi warga untuk merasakan rasa aman di komunitas mereka, sesuai dimensi keamanan komunitas UNDP yang menekankan pentingnya "*freedom from fear*" melalui kohesi sosial (UNDP, 2012).

Adanya kohesi sosial di Baarle bukanlah hasil kebetulan melainkan hasil dari kepercayaan antar warga yang dibina melalui aktivitas sehari-hari yang memperkuat ikatan "komunitas". Bentuk kohesi semacam ini sangat penting dalam konteks enklave-eksklave, karena menghasilkan rasa aman dan kebersamaan yang tidak bergantung pada batas fisik atau yurisdiksi negara. Hal ini menjadikan Baarle sebagai contoh bagaimana

ruang sosial dan praktis dapat menjadi pemersatu komunitas yang kuat, mencapai tujuan keamanan komunitas meski berada di wilayah yang sangat fragmentasi.

Kelima, **layanan publik dasar**, yang menekankan bahwa rasa aman komunitas tidak hanya bergantung pada ketiadaan kekerasan, tetapi juga pada keberlanjutan dan keterjangkauan layanan publik dasar seperti air, sanitasi, energi, dan pengelolaan limbah (UNDP, 2012). Dalam konteks wilayah yang sangat terfragmentasi seperti Baarle, implementasi indikator ini menuntut pendekatan yang inovatif dan lintas yurisdiksi antar dua negara tersebut. Implikasi empirisnya dapat dilihat dari adanya koordinasi pengelolaan air dan limbah antara dua otoritas lokal yang berbeda negara. Dalam hal ini, GOB dan kerangka kerja BGTC bersama-sama meningkatkan layanan publik dasar dan menjembatani komunikasi dengan operator utilitas dari masing-masing negara. Untuk wilayah Baarle-Nassau di Belanda, pengelolaan air permukaan dan limbah rumah tangga dilakukan oleh *Waterschap Brabantse Delta*, sebuah otoritas air regional yang mengatur kualitas air dan pengelolaan banjir. Di sisi Belgia, yaitu Baarle-Hertog, layanan pengelolaan limbah padat dikelola oleh *Intercommunale IOK Afvalbeheer*, lembaga antar-komunal yang bertanggung jawab atas pengumpulan sampah dan pengelolaan fasilitas daur ulang di Provinsi Antwerpen dan sekitarnya (European Commission, 2022). Tidak ada pembeda, semua warga menikmati kualitas layanan yang setara, termasuk pasokan air, pengelolaan saluran pembuangan, dan sistem daur ulang, tanpa perlu memahami batas yurisdiksi tempat tinggal mereka secara hukum.

Kualitas layanan publik ini menjadi landasan penting dalam dimensi *freedom from want* dalam *community security*, di mana rasa aman tercipta karena kebutuhan dasar masyarakat dipenuhi secara adil dan konsisten (UNDP, 2012). Sistem layanan publik dasar ini tidak hanya menjaga kenyamanan hidup, tetapi juga menghindari potensi konflik sosial akibat ketimpangan layanan. Di Baarle, sistem layanan publik ini bahkan mendukung pelaksanaan kegiatan lintas budaya dan komunitas, memperkuat kohesi sosial melalui keberfungsian infrastruktur dasar. Sehingga, penyelenggaraan layanan dasar di Baarle menunjukkan bagaimana tata kelola bersama yang berbasis kolaborasi dapat melampaui fragmentasi spasial dan menciptakan lingkungan yang aman, teratur, dan inklusif.

Keenam, **pengurangan kekerasan atau kriminalitas**, yang menekankan pada berkurangnya insiden konflik kekerasan, kejahatan, serta ketegangan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas komunitas. Di wilayah Baarle, indikator ini dapat diamati melalui minimnya ketegangan sosial dan stabilitas keamanan yang terjaga, meskipun terdapat kerumitan yurisdiksi yang kompleks. Tidak ditemukan bukti empiris adanya konflik horizontal besar, baik antarwarga maupun antara institusi lokal.

Contoh paling jelas muncul pada masa pandemi COVID-19, di mana adanya penjagaan perbatasan yang ketat yang dilakukan oleh Polisi Belgia. Selaras dengan hal itu, ada pula contoh empiris, ketika satu toko yang berdiri tepat di atas dua yurisdiksi menerapkan dua regulasi yang bertolak belakang: separuh toko tetap buka sesuai kebijakan Belanda, sementara separuh lainnya ditutup mengikuti aturan lockdown dari Belgia (Biesemans & Audouard, 2020). Sebagai respons, masyarakat dan pelaku usaha mengembangkan praktik adaptif yang disebut *micro-boundary practices* (penanda mikro dalam ruang fisik untuk membedakan yurisdiksi), seperti memasang pita penanda yurisdiksi di lantai bangunan, atau membatasi ruang dengan partisi fisik. Praktik ini tidak sekadar simbolik, melainkan memiliki dampak hukum nyata seperti perbedaan jam operasional, kewajiban penggunaan masker, dan izin kerumunan (Magniette, 2020). Tapi semua itu berjalan dengan aman tanpa adanya ketegangan tertentu.

Kemudian, bisa dilihat pada beberapa laporan angka kriminalitas. Dari laporan Kepolisian Belanda, Politie NL, 83 kejahatan tercatat di wilayah Baarle-Nassau selama tahun 2024, atau setara dengan 13 pencurian per 1.000 penduduk; yang mana ini tergolong sangat rendah. Sedangkan mengutip pada Laporan *Grenseffectenrapportage* 2024, yang menyebut keberadaan pos polisi bersama (*politiepost*) di Baarle-Nassau dan Baarle-Hertog sebagai bagian dari sistem *Euregional* menunjukkan adanya pengawasan bersama dan efektif dalam mengurangi dan memberantas angka kriminalitas di Baarle (ITEM Crossborder, 2024). Dengan demikian, indikator ini menunjukkan bahwa keamanan komunitas di Baarle tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, namun pada kapasitas sosial warga lokal dalam mengelola perbedaan dan mempertahankan tatanan sosial yang stabil di tengah struktur spasial yang kompleks dan terbagi-bagi agar tingkat kriminalitas tetap rendah.

Ketujuh, **kapasitas dan kolaborasi lembaga lokal**, yang menekankan pada kemampuan lembaga lokal dalam merespons dan mengelola keamanan komunitas. Di wilayah unik seperti Baarle, di mana pemerintahan lokal terbagi antara dua negara dan mencakup 30 enklave-eksklave kemampuan institusional menjadi faktor kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan kelangsungan layanan publik. Pada intinya, GOB dan BGTC yang menjembatani dan memfasilitasi kolaborasi antar lembaga lokal. BGTC memberikan dukungan kelembagaan serta pendanaan bagi berbagai proyek kerja sama lintas negara, termasuk di daerah-daerah perbatasan seperti Baarle. Proyek-proyek ini mencakup penguatan layanan publik, mulai dari integrasi tim pemadam kebakaran, harmonisasi perizinan usaha lintas batas, hingga koordinasi respons terhadap krisis kesehatan masyarakat.

Kolaborasi kedua negara dalam wilayah Baarle terlihat dari adanya sistem penanganan terpadu yang menghubungkan semua laporan darurat atau urgen yang masuk. Dengan standar operasional bersama, termasuk penggunaan satu nomor darurat terpadu yakni 112 yang secara otomatis dialihkan berdasarkan lokasi kejadian. Lembaga lokal itu akan ditangani oleh *Zona Hulpverlening Noorderkempen* jika berada pada wilayah Belgia dan *Veiligheidsregio Midden en West-Brabant* jika berada pada wilayah Belanda (Billé, 2020). Ketahanan institusional yang ditumbuhkan melalui GOB dan BGTC memungkinkan respons yang cepat dan terkoordinasi terhadap kebutuhan warga, sekaligus menjaga kohesi sosial dan integrasi layanan publik secara menyeluruh, kolaborasi yang sangat baik. Dari semua analisis berdasar tujuh indikator ketercapaian keamanan komunitas tersebut, terlihat pada tataran empiris, semua indikator untuk menjaga keamanan komunitas di Baarle sudah dilakukan secara praktis kehidupan sehari-hari.

Dinamika Tata Kelola Perbatasan dalam Konteks Enklave–Eksklave Wilayah Baarle

Setelah melihat bagaimana implementasi keamanan komunitas di Baarle, maka bahasan selanjutnya adalah menjawab pertanyaan kedua mengenai tata kelola perbatasan Baarle. Pengelolaan perbatasan di wilayah Baarle mencerminkan model kedaulatan yang berbeda dari logika *nation-states* pada umumnya. Di sini, kedaulatan bukan lagi dimaknai sebagai kekuasaan tunggal atas satu wilayah yang utuh, tetapi sebagai bentuk distribusi yurisdiksi dalam ruang yang bersifat interstisial, yaitu ruang-ruang kecil yang saling bersinggungan dan bahkan bertumpang tindih. Konsep ini dikenal sebagai ***mosaic sovereignty***, yakni kedaulatan dalam bentuk partisi fungsional yang tetap berjalan meskipun tidak berbentuk satu kesatuan spasial (Billé, 2020).

Dalam praktiknya, kedaulatan negara di Baarle hadir bukan melalui dominasi fisik, tetapi melalui mekanisme koordinasi administratif yang berjalan lintas batas: pelayanan

publik dikelola berdasarkan asal yurisdiksi pemilik properti, bukan berdasarkan lokasi absolut. Di sinilah negara bekerja secara mikro; di rumah warga, toko, sekolah, bahkan dalam sistem pembuangan air, sebagai bentuk kedaulatan operasional, atau yang disebut Franck Billé (2020) sebagai *sovereignty-in-practice*.

Kondisi ini menghasilkan suatu bentuk keteraturan administratif di tengah ketidakaturan spasial. Negara hadir dalam skala mikro, bukan makro. Penyelenggaraan layanan, perpajakan, dan hukum tidak dilandasi oleh garis batas linier, melainkan oleh perjanjian teknis lokal yang memungkinkan keduanya berjalan tanpa menimbulkan konflik yurisdiksi yang signifikan. Penulis melihat, pendekatan Baarle ini lebih mencerminkan pengelolaan fungsional daripada kontrol teritorial, dan menjadi wujud modern dari negosiasi kedaulatan yang adaptif terhadap konteks sosial-geografis, sama seperti judul yang penulis tuliskan. Model *mosaic sovereignty* di Baarle menantang pendekatan kedaulatan yang kaku dan berbasis pada eksklusivitas wilayah. Perbatasan Baarle menunjukkan bahwa dua sistem hukum dan administratif bisa beroperasi berdampingan tanpa menuntut rekonsiliasi spasial, selama terdapat konsistensi institusional dan kerangka kolaboratif yang kuat. Keberhasilan ini bukan disebabkan oleh penyatuan hukum atau homogenisasi kebijakan, melainkan oleh kemauan untuk mengelola perbedaan dalam struktur yang terpecah. Dengan demikian, pemaknaan kedaulatan di Baarle tidak lagi bertumpu pada narasi "menguasai ruang", melainkan pada bagaimana negara mengelola fungsinya secara terukur dan terbagi. Model ini menjadi refleksi penting bahwa dalam konteks globalisasi dan integrasi regional, pengelolaan batas tidak selalu harus mengarah pada penyederhanaan spasial, tetapi bisa dijalankan dengan memperkuat rekayasa administratif pada ruang-ruang mikro.

Sementara itu, praktik ***everyday bordering*** menjadi sarana penting bagi warga Baarle untuk menjalani hidup di tengah kompleksitas yurisdiksi. Konsep ini merujuk pada praktik sosial dan simbolik dalam kehidupan sehari-hari di mana batas negara tidak hanya dipraktikkan oleh negara, tetapi juga oleh warga melalui rutinitas harian. Di Baarle, praktik ini terlihat dalam cara warga menentukan letak pintu depan sebagai penentu yurisdiksi administratif, yang disebut *voordeurregel*. Dengan sistem ini, satu rumah bisa memiliki dua identitas yurisdiksi, tergantung pada di mana pintu utama berada; hal ini memengaruhi hal-hal administratif seperti perpajakan, pemilihan umum, dan sistem hukum yang berlaku (Billé, 2020).

Misalnya, dalam pelaksanaan Pemilu Parlemen Uni Eropa 2024, di mana warga Belanda dan Belgia di Baarle harus memberikan suara pada hari yang berbeda dan untuk daftar perwakilan politik yang berbeda, meskipun tinggal di lingkungan yang sama. Belanda menyelenggarakan pemilihan pada Kamis, 6 Juni 2024 sesuai dengan Undang-Undang Elektoral Belanda, warga negara Uni Eropa yang telah berusia minimal 18 tahun memiliki hak untuk memilih dengan kartu pemilih (*kiezerspas*) (European Parliament, 2024). Sementara Belgia melaksanakannya pada Minggu, 9 Juni 2024 sesuai dengan kebijakan compulsory voting bagi warga negara Belgia yang berusia 16 tahun ke atas (European Parliament, 2024). Dalam praktiknya, pemungutan suara dilakukan di tempat terpisah dengan logistik dan struktur surat suara yang sepenuhnya berbeda, bahkan untuk warga yang mungkin tinggal berdampingan dalam satu jalan.

Penyesuaian terhadap sistem ganda dua negara ini tidak menimbulkan ketegangan, melainkan telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif warga Baarle. Bahkan dalam masa pandemi COVID-19, ketika kebijakan lockdown Belanda dan Belgia berbeda, pelaku usaha menyesuaikan letak rak barang atau tempat duduk pelanggan agar tetap patuh terhadap kebijakan negara tertentu. Kondisi semacam ini disebut *micro-boundary practices*, yang menjadi bukti nyata dari *everyday bordering* dalam konteks

darurat (Magniette, 2020). Tata kelola perbatasan di Baarle menunjukkan kebersamaan dalam pengelolaannya agar konflik dapat dihindarkan, warga lebih memilih memahami batasan yang ada sebagai hal yang perlu dikelola dan diintegrasikan secara bersama-sama.

Kesimpulan

Tata kelola perbatasan di era kontemporer, umumnya selalu ditandai dengan simbol yang makro seperti tembok perbatasan, hingga pagar-pagar berduri. Namun, studi kasus wilayah Baarle dengan fragmentasi yang kompleks berisi 30 enklave dan eksklave antara Belanda dan Belgia; membuktikan bahwa perbatasan tidak selalu hadir dalam bentuk yang tegas, tapi justru sangat mikro dengan hanya cat di wilayah perbatasan atau bahkan hanya nomor dan bendera pada bangunan (disebut *soft border*). Fragmentasi spasial ekstrem di Baarle ini justru menunjukkan bahwa kehidupan lintas batas tetap dapat berjalan secara aman, tertib, dan produktif ketika didukung oleh tata kelola yang fleksibel serta praktik sosial yang inklusif. Dalam kondisi inilah konsep *community security* menemukan relevansinya, yakni sebagai pendekatan yang memusatkan perhatian pada keamanan manusia di tingkat lokal melalui partisipasi warga, kolaborasi antar institusi, dan respons terhadap dinamika sosial yang kompleks.

Berdasarkan tujuh indikator *community security* dari UNDP, tulisan ini menemukan bahwa keamanan komunitas di Baarle tidak dibangun melalui pendekatan koersif atau pemisahan spasial, melainkan melalui pengakuan terhadap sejarah, struktur yurisdiksi yang tumpang tindih, dan pembentukan mekanisme kolaboratif. Adanya badan seperti GOB dan BGTC menunjukkan bahwa kapasitas lokal memiliki peran krusial dalam menjembatani yurisdiksi nasional yang berbeda. Praktik administratif yang lentur, seperti aturan *front door rule*, serta koordinasi lintas negara dalam layanan publik, menjadi contoh konkret bagaimana komunitas dapat menjalani kehidupan sehari-hari di tengah struktur politik yang kompleks tanpa menimbulkan konflik.

Lebih jauh, konsep *mosaic sovereignty* dan *everyday bordering* telah membuktikan fungsinya bukan hanya sebagai kerangka analitis, tetapi sebagai realitas empirik yang membentuk cara warga dan institusi di Baarle berinteraksi. *Mosaic sovereignty* mencerminkan kedaulatan yang tidak seragam secara spasial namun tetap operasional secara fungsional; sementara *everyday bordering* memperlihatkan bahwa batas negara tidak harus menjadi penghalang sosial, melainkan dapat dinegosiasikan melalui simbol dan praktik di praktik sehari-hari. Kedua konsep ini saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana keteraturan sosial dan keamanan dapat diciptakan melalui fleksibilitas, bukan dominasi. Dalam konteks fragmentasi geopolitik global saat ini, pelajaran dari Baarle menjadi semakin relevan: bahwa stabilitas tidak selalu ditentukan oleh homogenitas spasial, melainkan oleh kepekaan dan kesadaran untuk membangun tata kelola yang adaptif.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyumbang pada studi perbatasan dan keamanan komunitas secara teoritis, tetapi juga menawarkan model praktis bagi wilayah-wilayah lain yang mengalami tantangan serupa. Pendekatan berbasis komunitas yang dikombinasikan dengan kolaborasi kelembagaan lintas batas mampu menjadi alternatif dari tata kelola konvensional yang sering kali gagal menjawab kompleksitas spasial dan identitas kultural di banyak wilayah perbatasan. Apa yang terjadi di Baarle menunjukkan bahwa keteraturan bukan hasil dari keseragaman, tetapi dari kesepahaman yang dibangun melalui negosiasi, partisipasi, dan integrasi simbolik dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Bieseemans, B., & Audouard, J. (2020, Maret 26). *Dutch-Belgian border village left half open, half shut by virus*. Diambil kembali dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/world/dutch-belgian-border-village-left-half-open-half-shut-by-virus-idUSKBN21D25A>
- Bilivoka. (2017, November 11). *Completely borderline in The Netherlands and Belgium*. Diambil kembali dari <https://bilivoka.com/en/completely-borderline-in-the-netherlands-and-belgium>
- Billé, F. (2020). Jigsaw Micropartitioning in the Enclaves of Baarle-Hertog/Baarle-Nassau. *Voluminous States*, 217-229.
- Borgen, C. (2019, Agustus 14). *A Tale of Two Baarles: Crazy-Quilt Maps and Sovereignty Over Certain Frontier Land*. Diambil kembali dari <http://opiniojuris.org/2014/08/19/crazy-quilts-sovereignty-certain-frontier-land>
- CBS Netherlands. (2021). *The Netherlands in numbers, 2021 edition*. Statistics Netherlands. Diambil kembali dari <https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/37259eng/table?dl=1310C>
- de Uilenpoort. (2025). *Welkom op de website van basisschool de Uilenpoort*. Diambil kembali dari <https://basisschooldeuilenpoort.nl>
- DXP. (2024). *Festival Op de Grens 2024*. Diambil kembali dari <https://festivalopdegrens.nl>
- European Commission. (2022). *Cross-border public services*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- European Parliament. (2024, April 19). *How to vote in Netherlands*. Diambil kembali dari <https://elections.europa.eu/en/how-to-vote/nl>
- Franckx, E. (1998). Belgium and the Netherlands Settle Their Last Frontier Disputes on Land as Well as at Sea. *Revue Belge de Droit International*, 1998(2), 339-346.
- Harkness, V. (2015, September 24). *Visit to Baarle-Hertog/Baarle-Nassau*. Diambil kembali dari <https://www.vicharkness.co.uk/2015/09/24/visit-to-baarle-hertogbaarle-nassau>
- ITEM Crossborder. (2024). *Grenseffectenrapportage 2024*. Maastricht: Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility.
- Jańczak, J. (2012). Baarle-Hertog and Baarle-Nassau: Functional Interdependence of the Nested Territorial and Political Structures. *European Exclaves in the Process of De-bordering and Re-bordering*, 57-63.
- Magniette, S. (2020, Agustus 13). *Netherlands' Belgian enclave juggles tricky virus rules*. Diambil kembali dari The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/08/13/netherlands-belgian-enclave-juggles-tricky-virus-rules.html>
- Marchon, O. (2022, September 22). *Siamese cities of Baarle-Duc and Baarle-Nassau*. Diambil kembali dari <https://threadreaderapp.com/thread/1574303693071319041>
- Perbawani, F. C. (2022). MIGRASI DAN XENOFobia: ANALISIS KEBIJAKAN MIGRASI TERTUTUP HONGARIA ERA PERDANA MENTERI VIKTOR ORBÁN. *Journal Publicuho*, 815-826.

- Statistics Belgium. (2024). *City Population Baarle-Hertog*. Antwerpen: City Population.
- Tukker, W. (2024). *KVV DOSKO Baarle Hertog*. Diambil kembali dari <https://extremefootballtourism.blogspot.com/2013/12/belgium-rkvv-dosko-baarle-hertog>
- UNDP. (2012). *Community security and social cohesion: Towards a UNDP approach*. Geneva: United Nations Development Programme.
- Zhurzhenko, T. (2012). Bordering and Ordering the Twenty-first Century: Understanding Borders. *Journal of Borderlands Studies*, 27(3), 365-366. doi: <http://dx.doi.org/10.1080/08865655.2012.750954>